

ANALISIS PRAKTEK TATA KELOLA (*GOOD GOVERNANCE*) PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

AN ANALYSIS OF THE PRACTICE OF GOOD GOVERNANCE THROUGH IMPLEMENTATION OF THE ACCOUNTABILITY SYSTEM PERFORMANCE GOVERNMENT AGENCIES (SAKIP) ON THE STATE SLEMAN DISTRICT

Putri Lestari Permata Kasih¹⁾, Kasmadi²⁾, Irfan Tanjung³⁾

¹⁾STIE Bangkinang, Kampar, putrilestaripermatakashih66@gmail.com

²⁾STIE Bangkinang, Kampar, casmadica@gmail.com

³⁾STIE Bangkinang, Kampar, irfant46@yahoo.co.id

ABSTRAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang baik melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder dengan pendekatan studi dokumentasi. Adapun studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti dokumen pedoman penyusunan SAKIP dan LAKIP, dan dokumen SAKIP LAKIP Tahun 2017-2018. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat implelementasi SAKIP Pada Kabupaten Sleman dan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan atas evaluasi SAKIP LAKIP dengan mengikuti PerMenPAN-RB 12 Tahun 2015. Hasil Penelitian terhadap implelementasi SAKIP Pada Kabupaten Sleman telah dikatakan berhasil, rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti dengan memuaskan, dan dapat mendukung terciptanya *good governance* atau tata kelola pemerintah yang baik.

Kata Kunci: SAKIP, LAKIP, Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

ABSTRACT. *The purpose of this research is to find the practice of good governance through implementation of the accountability system performance government agencies (sakip) on the state sleman district .This research is qualitative research was conducted by the use of secondary data with the approach the study documentation .As for the study documents that are undertaken in this research is a document relating to train them the government accountability system performance such as a document guidelines for preparing sakip and lakip , and documents sakip lakip 2017-2018 year .The method of analysis descriptive used to know the extent of the level implelementasi sakip on kabupaten sleman and follow-up on the recommendations given over evaluation sakip lakip by following permenpan-rb 12 years 2015 . The outcome of research on implelementasi sakip on sleman district have been successfully, the recommendation followed by satisfactory, and could support the establishment of good governance.*

Keywords: SAKIP, LAKIP, Good Governance

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, perkembangan akuntansi sektor publik pada lingkungan instansi pemerintah semakin meningkat pesat dengan ditandai adanya reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain daripada itu, adanya globalisasi membuat setiap negara menuntut daya saing juga hingga sampai kepada tiap lini pemerintah daerahnya. Daya saing pada pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang dapat dicapai melalui kebijakan otonomi daerah.

Otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan daerah tersebut dalam hal memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan agar dapat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu bentuk kewajiban yang wajib dipenuhi oleh sektor publik. Tahir (2011: 103) mengemukakan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik pada lingkungan pemerintah tidak lepas dari adanya sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (*planning, organizing, actuating dan controlling*) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten.

Menurut Mahsun (2013:20), *good governance* adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada organisasi sektor publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan aspek-aspek fungsional pada pemerintahan secara efektif dan efisien. Terciptanya kepercayaan pada diri masyarakat

kepada pemerintah atas program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh pihak penyelenggara melalui pelayanan publik yang diberikan, memberikan pandangan bahwa suatu pemerintahan telah berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mencerminkan akuntabilitas komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana yang diamanatkan TAPMPRRI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dimana keduanya mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara, untuk membuat laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dilaksanakan yang didasarkan atas perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintahan, melaporkan kinerja apa saja yang telah dilakukannya dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Proses penilaian ini dilakukan secara terukur sehingga dapat dijadikan bagian dari proses sistematika pembelajaran bagi instansi pemerintah agar terus meningkatkan kualitas kelembagaannya sehingga berdampak pada meningkatkan kinerjanya.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan dan memperoleh predikat “BB”, nilai 78,06% dengan interpretasi: memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”. Hasil evaluasi SAKIP bukan hanya menitikberatkan pada nilai yang diberikan, namun juga menunjukkan bagaimana kemampuan instansi pemerintah dalam melakukan pengelolaan penggunaan anggaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan demi memberikan pelayanan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kemenpan-RB juga memberikan rekomendasi dalam rapor tersebut, agar setiap pemerintah daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka penulis melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Praktek Tata Kelola (Good Governance) Pemerintahan Yang Baik Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Sleman**”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui tingkat perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui apakah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ini mampu mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Kabupaten Sleman.

Akuntansi Sektor Publik

Menurut James M Reeve, dkk (2013:9) akuntansi adalah suatu sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kondisi ekonomi perusahaan. Selain itu akuntansi juga memberikan informasi untuk pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan”.

Menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik serta swasta.

Tata Kelola (*Good Governance*)

Menurut Mardiasmo (2018: 32) mengatakan bahwa *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, World Bank dalam Mardiasmo (2018: 32) mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi pertumbuhan aktivitas usaha.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah serangkaian sistemik dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Adapun waktu yang digunakan selama penelitian kurang lebih selama 3 bulan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan keadaan di tempat penelitian.

Berdasarkan sumbernya, data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SAKIP yang dapat diakses pada website <https://sakup.slemankab.go.id/main.php>.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode data kualitatif yaitu dengan melakukan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu bentuk metode pengumpulan data kualitatif dimana peneliti melihat atau menganalisis dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan setiap dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seperti dokumen pedoman penyusunan SAKIP dan LAKIP, dan dokumen LAKIP, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan SAKIP.

Analisa Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan dua tahapan, yaitu analisis data untuk mengetahui sejauh mana tingkat implemmentasi SAKIP Pada Kabupaten Sleman dan analisis rekomendasi yang diberikan atas evaluasi SAKIP LAKIP yang tindaklanjut dengan mengikuti PerMenPAN-RB 12 Tahun 2015 sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat praktek tata kelola (*good governance*) pemerintahan yang baik melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pemerintah Kabupaten Sleman.

Indikator Penilaian SAKIP

Indikator yang dijadikan penilaian pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Indikator Penilaian SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
Total		100%

Sumber: Per. Men. PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015

Berdasarkan lima komponen dasar manajemen kinerja tersebut maka akan dihasilkan nilai yang kemudian diinterpretasikan sebagai keberhasilan ataupun kegagalan sebuah SAKIP. Nilai, kategori, dan interpretasi ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kategori, Nilai, dan Interpretasi Hasil Evaluasi SAKIP

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	0-30	D	Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan yang sangat mendasar
2	>30-50	C	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
3	>50-65	CC	Cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
4	>65-75	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	>70 – 80	BB	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
6	>80 – 90	A	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
5	>90 -100	AA	Sangat Memuaskan

Sumber: Per. Men. PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan instrument penelitian sebagaimana disajikan pada bab metode penelitian diketahui bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sleman berpedoman pada Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota .

Adapun pedoman atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sleman tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh assesor atau evaluator berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 12 Tahun 2015.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi SAKIP LAKIP Kabupaten Sleman terdapat beberapa rekomendasi atas SAKIP LAKIP tahun 2017 yang ditindaklanjuti dengan penilaian berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 sehingga memberikan peningkatan SAKIP LAKIP tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3. Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Sleman

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP LAKIP Tahun 2017	Tindak Lanjut SAKIP LAKIP Tahun 2018	Nilai	Total (%)
A. Perencanaan Kinerja				
1	Melakukan Peninjauan Kembali atas target indikator kinerja sasaran.	Pada tahun 2019 dilakukan evaluasi dan perubahan RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021. Kemudian dilanjutkan perubahan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah khususnya yang memuat target kinerja indikator sasaran pada perangkat daerah dimaksud.	1,00	100%
2	Melakukan pensinkronan secara berkelanjutan antar data perencanaan yang ada di dokumen resmi yang di <i>upload</i> di sistem.	Monitoring dalam input data sistem dilakukan secara periodik, dikoordinasikan oleh Bappeda melibatkan perangkat daerah pengelola data kinerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola sistem.	1,00	
3	Memanfaatkan secara optimal Rencana Aksi dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan antara lain pemanfaatan dalam pengalokasian anggaran.	Dalam setiap verifikasi/pembahasan usulan perencanaan kerja kegiatan dan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selalu dilakukan pencermatan terhadap dokumen perencanaan yang terkait seperti dokumen rencana aksi, masterplan, roadmap dan sebagainya.	1,00	
B. Pengukuran Kinerja				
1	Hasil Pengukuran kinerja agar dikaitkan dengan pemberian <i>reward & punishment</i> sampai dengan tingkat staf.	Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP PNS) telah disempurnakan. TPP PNS diberikan berdasarkan golongan/pangkat menjadi berdasarkan nama jabatan hasil analisa jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan. TPP PNS diberikan pengurangan atau punishment terhadap pegawai yang tidak hadir, terlambat, mendahului pulang, pegawai meninggalkan tempat tugas bukan untuk kepentingan dinas tanpa izin atasan, keterlambatan pelaporan LHKPN dan LHKASN, dan realisasi keuangan perangkat daerah yang kurang dari 85% setiap bulannya.	1,00	100%
2	Agar data yang digunakan untuk pengukuran kinerja semakin valid dan handal, mekanisme pengumpulan data agar dibuat lebih spesifik sesuai dengan sifat dari masing-masing data agar ditentukan penanggungjawab dari masing-masing data dan pengukuran.	Sudah dilakukannya pengumpulan data yang secara spesifik.	1,00	
C. Pelaporan Kinerja				
1	Penyajian Informasi Kinerja dalam LAKIP agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam.	Pada Penyajian Informasi Kinerja dalam LAKIP telah memuat penjelasan akan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam.	1,00	100%
2	Agar kualitas laporan kinerja masing-masing SKPD lebih terjaga, diperlukan pendampingan/penyamaan persepsi sehingga format laporan sesuai ketentuan.	Telah dilakukannya pendampingan/penyamaan persepsi sehingga format laporan sesuai ketentuan.	1,00	
D. Evaluasi Internal				
1	Agar rekomendasi hasil evaluasi dapat terpantau, diperlukan mekanisme evaluasi atas tindak lanjut yang dilakukan atas saran dan perbaikan.	Telah terdapat mekanisme evaluasi atas tindak lanjut yang dilakukan atas saran dan perbaikan.	1,00	100%

2	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti diimplementasikan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan manajemen kinerja, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian <i>reward and punishment</i> hingga ke tingkat staf.	Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan, perbaikan manajemen kinerja, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pemberian <i>reward and punishment</i> hingga ke tingkat staf.	1,00	
E. Capaian Kinerja				
1	Agar terus dilakukan usaha peningkatan kinerja, terutama dalam hal peningkatan kinerja untuk indikator-indikator sasaran yang belum tercapai, diantaranya adalah: Predikat LAKIP Kabupaten, Rata-rata nilai ujian SD, Rata-rata nilai ujian SMP, Pertumbuhan ekonomi, Nilai ekspor, dan Nilai Tukar Tani.	Telah dilakukan usaha peningkatan kinerja, terutama dalam hal peningkatan kinerja untuk indikator-indikator sasaran yang belum tercapai ≤ 20%	0,25	62,5%
2	Agar terus melakukan peningkatan kinerja agar memperoleh penghargaan tidak hanya bertaraf nasional tetapi juga penghargaan bertaraf internasional.	Telah dilakukannya peningkatan kinerja agar memperoleh penghargaan tidak hanya bertaraf nasional tetapi juga penghargaan bertaraf	1,00	
Total Nilai Akhir				82,5

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa sebagian besar rekomendasi penilaian atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2017 yang diberikan oleh Inspektorat DIY telah dilakukan tindak lanjut oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga mencapai tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja yang baik yang ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP LAKIP dari tahun sebelumnya.

Perbandingan keadaan sebelum dan sesudah, digunakan untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mendapatkan penguatan perbandingan dari tahun ke tahun, sehingga diketahui penurunan dan kenaikan implementasi praktek sehat tata kelola pemerintah yang baik berbasis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana tabel V.II berikut:

Tabel 4. Keadaan Sebelum (Before) dan Sesudah (After) Implementasi SAKIP Kabupaten Sleman Tahun 2017-2018

No	Komponen	Bobot	Nilai Tahun 2017 (Before)	Nilai Tahun 2018 (After)	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,85	27,49	Terjadinya peningkatan
2	Pengukuran Kinerja	25%	20,24	20,96	Terjadinya peningkatan
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,37	13,06	Terjadinya peningkatan
4	Evaluasi Internal	10%	7,25	8,23	Terjadinya peningkatan
5	Capaian Kinerja	20%	12,34	11,97	Terjadinya penurunan
Nilai		100%	78,06	81,72	
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A	Terjadi Kenaikan Sebesar 3,66% Dari Tahun Sebelumnya

Sumber: Dokumen LAKIP Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4 terdapat sejumlah komponen, dimana nilai tahun sebelumnya 2017 (before) mengalami peningkatan di tahun 2018 (after). Pada komponen 1; Perencanaan Kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai 25,85% dan mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 27,49%. Pada komponen 2; Pengukuran Kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai 20,24% dan mengalami peningkatan 20,96%. Pada komponen 3; Pelaporan Kinerja tahun 2017 mendapatkan nilai sebesar 12,37% dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 13,06%. Pada komponen 4; evaluasi internal mendapatkan nilai sebesar 7,25% pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 8,23%. Pada komponen 5; capaian kinerja tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun 2018, dimana di tahun 2017 capaian kinerja mendapatkan nilai 12,34 dan ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi 11,97.

Dengan demikian diperoleh informasi bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2018 (after) mengalami peningkatan sebesar 3,66% dari tahun sebelumnya (before). Adapun terjadinya peningkatan pada tahun 2018 disebabkan oleh tindak lanjut (sebagian

besar) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman atas rekomendasi atas evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2017 yang diberikan oleh inspektorat DIY.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisa pada data-data yang didapat baik berupa informasi dan laporan dalam bentuk LAKIP Kabupaten Sleman, diketahui bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Sleman terbagi menjadi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

A. Perencanaan Kinerja

1. Sub Komponen RPJMD
 - a. Salah satu bagian terpenting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sebagai acuan target kinerja. RPJMD Kabupaten Sleman disusun untuk jangka waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil dokumentasi pada dokumen RPJMD, diketahui bahwa RPJMD sudah menggambarkan dengan jelas visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah. RPJMD yang telah disusun telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dokumen RPJMD telah dipublikasikan di dalam website Sistem Informasi Manajemen (SIM) Laporan SAKIP Kabupaten Sleman pada komponen Perencanaan Kinerja.
 - b. Tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada dokumen RPJMD sudah berorientasi pada hasil dan RPJMD sudah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dokumen RPJMD telah direviu secara berkala. Hal ini terbukti dengan dilakukannya evaluasi perubahan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2017.
2. Sub Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT)
 - a. Dokumen RKT, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), dan dokumen Rencana Aksi telah disusun. Perjanjian Kinerja (PK) telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dokumen PK telah dipublikasikan di dalam website Sistem Informasi Manajemen (SIM) Laporan SAKIP Kabupaten Sleman pada komponen Perencanaan Kinerja.
 - b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) sudah berorientasi pada hasil. Program yang terdapat dalam RKT ditetapkan dalam rangka untuk mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) disusun selaras dengan dokumen RPJMD. Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja yaitu dalam periode triwulan, dan Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.
 - c. Implementasi RKT, RKT telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan Rencana Aksi telah di monitor pencapaiannya secara triwulan dalam SIMDALEV. Namun pada tahun 2017 Rencana Aksi belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan terutama dalam pengalokasian anggaran.

B. Pengukuran Kinerja

1. Sub Komponen Pemenuhan Pengukuran

Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Namun untuk mekanisme pengumpulan data kinerja belum ditentukan penanggung jawab yang jelas dari masing-masing data dan pengukuran. Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan di Sistem Informasi Manajemen (SIM) Laporan SAKIP pada bagian pelaporan kinerja.
2. Sub Komponen Kualitas Pengukuran

IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik, telah cukup untuk mengukur kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman, dan pengukuran kinerja Kabupaten Sleman sudah dikemabngkan menggunakan teknologi SIMDALEV.
3. Sub Komponen Implementasi Pengukuran

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. IKU juga telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, dan juga hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment namun belum dikaitkan sampai dengan tingkat staf.

C. Pelaporan Kinerja

1. Sub Komponen Pemenuhan Pelaporan
Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu serta menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan Kinerja telah disertai pernyataan telah direviu oleh APIP dan juga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) telah dipublikasikan.
2. Sub Komponen Penyajian Informasi Kinerja
LAKIP telah menyajikan informasi pencapaian target jangka menengah, LAKIP juga menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. Laporan Kinerja tahun 2017 dan 2018 telah menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya namun tidak menyajikan perbandingan dengan standar nasional. Pada tahun 2017, Laporan Kinerja tahun 2017, telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, tetapi hanya berupa info tentang efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan dan tidak terdapat analisa yang lebih mendalam. Namun pada tahun 2018, Laporan Kinerja telah menyajikan dan menjelaskan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya secara mendalam yakni dengan menjelaskan secara detail info tentang efisiensi penggunaan anggaran. Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi dan juga informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan
3. Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja
Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan informasi yang disajikan dalam LAKIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan juga telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta telah digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman.

D. Evaluasi Kinerja

1. Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi
Terdapat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja pada pemerintah Kabupaten Sleman. Namun untuk evaluasi kinerja tahun 2017 masih belum terdapat pemantauan mengenai rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal. Tetapi pada tahun 2018, rekomendasi hasil evaluasi kinerja internal pada Kabupaten Sleman telah pemantauan mengenai kemajuannya dimana Inspektorat Kabupaten Sleman menyajikan tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi SKPD ke dalam laporan hasil evaluasi AKIP SKPD tahun berikutnya. Dan Laporan Kinerja hasil evaluasi telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sub Komponen Kualitas Evaluasi
Pada evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan pedoman evaluasi yang selaras dengan pedoman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan telah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten yaitu Inspektorat DIY. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menggambarkan akuntabilitas kinerja yang dievaluasi dan Evaluasi Kinerja telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan
3. Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi
Pada hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan, dan perbaikan penerapan manajemen kinerja. Namun pada tahun 2018, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah digunakan dalam melakukan revisi dokumen perencanaan daerah, perbaikan. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kerja dan Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Pencapaian Kinerja

1. Sub Komponen Kinerja Yang Dilaporkan (Output)
Target dapat dicapai dengan baik dimana pencapaian kinerja dari 15 sasaran yang ada pada laporan kinerja kabupaten sleman masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai 100%. Capaian kinerja pun lebih baik dari tahun sebelumnya dan Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.
2. Sub Komponen Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Pada komponen kinerja yang dilaporkan (outcome) untuk tahun 2017, target indikator kinerja sasaran belum sepenuhnya tercapai. Adapun indikator-indikator sasaran yang belum tercapai pada tahun 2017, diantaranya adalah:

- Predikat LAKIP Kabupaten
- Rata-rata nilai ujian SD
- Rata-rata nilai ujian SMP Pertumbuhan ekonomi
- Nilai Ekspor
- Nilai Tukar Petani

Untuk tahun 2018, beberapa target indikator kinerja sasaran di tahun 2017 yang belum tercapai, beberapa sudah dilakukan pencapaian target meskipun masih belum sepenuhnya tercapai dimana hanya Indikator sasaran predikat LAKIP Kabupaten dan Nilai Tukar Petani telah mencapai target.

Dengan demikian, diketahui bahwa nilai SAKIP Kabupaten Sleman pada tahun 2018 yang) mengalami peningkatan sebesar 3,66% dari tahun sebelumnya dimana SAKIP Kabupaten Sleman mendapatkan nilai A yang artinya bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sleman memiliki interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.

Meningkatnya kualitas nilai SAKIP Kabupaten Sleman pada tahun 2018 yang mendapatkan terjadi dikarenakan tidak lepasnya dari usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi atas evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut ini adalah komponen-komponen dari SAKIP yang ditindaklanjuti untuk perbaikan sehingga meningkatkan nilai SAKIP pada tahun 2018:

A. Perencanaan Kinerja

1. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar melakukan peninjauan kembali atas target indikator kinerja sasaran. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan evaluasi dan perubahan RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2019. Kemudian dilanjutkan dengan perubahan RenStra perangkat daerah khususnya yang memuat target kinerja indikator sasaran pada perangkat daerah.
2. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar melakukan pensinkronan secara berkelanjutan antar data perencanaan yang ada di dokumen resmi yang di upload di sistem. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan monitoring dalam input data sistem yang dilakukan secara periodic, dikoordinasikan oleh Bappeda dengan melibatkan perangkat daerah pengelola data kinerja dan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku pengelola sistem.
3. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar memanfaatkan secara optimal Rencana Aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan antara lain pemanfaatan dalam pengalokasian anggaran. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan verifikasi/pembahasan setiap usulan perencanaan kerja kegiatan dan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), selalu dilakukan pencermatan terhadap dokumen perencanaan yang terkait seperti dokumen rencana aksi, masterplan, roadmap, dan sebagainya.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar dalam setiap hasil pengukuran kinerja agar dikaitkan dengan pemberian reward & punishment sampai dengan tingkat staf. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan penyempurnaan atas Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP PNS). Dimana TPP PNS diberikan dari berdasarkan golongan/pangkat menjadi berdasarkan nama jabatan hasil analisa jabatan, analisa beban kerja, dan evaluasi jabatan. TPP PNS diberikan pengurangan atau punishment terhadap pegawai yang tidak hadir, terlambat, mendahului pulang, pegawai meninggalkan tempat tugas bukan untuk kepentingan dinas tanpa izin atasan, keterlambatan pelaporan LHKPN dan LHKASN, dan realisasi keuangan perangkat daerah yang kurang dari 85% setiap bulannya.
2. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar data yang digunakan untuk pengukuran kinerja semakin valid dan handal, mekanisme pengumpulan data agar dibuat lebih spesifik sesuai dengan sifat dari masing-

masing data dan agar ditentukan penanggungjawab dari masing-masing data dan pengukuran. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan penyempurnaan atas Mekanisme pengumpulan data kinerja dan penanggungjawab masing-masing data kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar Penyajian Informasi Kinerja dalam LAKIP agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara lebih mendalam dimana sebelumnya pada LKjIP tahun 2017 hanya menyajikan berupa info tentang efisiensi penggunaan anggaran yang telah dilakukan dan tidak terdapat analisa yang lebih mendalam. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan menyajikan dan menjelaskan informasi tentang analisis penggunaan sumber daya secara mendalam yakni dengan menjelaskan secara detail info tentang efisiensi penggunaan anggaran.
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 sebanyak 291 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp372.970.750.057,00 dan total setelah ditetapkan HPS turun menjadi sebesar Rp367.785.451.777,00, dan dalam proses pelaksanaan pemilihan setelah dilakukan negosiasi oleh kelompok kerja pemilihan anggaran turun menjadi sebesar Rp322.861.117.456,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran dalam pengadaan barang/jasa sebesar Rp44.924.334.321,00 atau sebesar 14% dari total HPS.
 - b. Pemerintah Kabupaten Sleman selalu mendorong perangkat daerah agar dalam pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam e-Catalog maka dilakukan pengadaan dengan e-Purchasing. Pada tahun 2018 perangkat daerah di Kabupaten Sleman telah melakukan pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing dengan total rencana pengadaan sebesar Rp97.677.191.458,00 dan realisasi pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing setelah dilakukan negosiasi turun menjadi Rp78.476.776.162,56 sehingga terdapat efisiensi pengadaan barang/jasa melalui e-Purchasing Rp19.200.415.295,44 atau sebesar 19%.
 - c. Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan operasional, dalam pertanggungjawabannya harus melampirkan print-out pembelian BBM. Alokasi anggaran BBM senilai Rp16.598.521.650,00 akan terealisasi 100% jika menggunakan sistem stock. Namun dengan kebijakan print-out, maka realisasi BBM hanya mencapai Rp13.107.930.492,00, sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp3.490.591.158,00 atau 21,03%.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman agar kualitas laporan kinerja masing-masing SKPD lebih terjaga, diperlukan pendampingan/penyamaan persepsi sehingga format laporan sesuai ketentuan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan pengevaluasian dan penyempurnaan atas format pelaporan kinerja sebagai acuan penyusunan LAKIP perangkat daerah.

D. Evaluasi Internal

1. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar rekomendasi hasil evaluasi dapat terpantau, diperlukan mekanisme evaluasi atas tindak lanjut yang dilakukan atas saran dan perbaikan. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh Inspektorat dimana akan menyajikan tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi AKIP SKPD ke dalam laporan hasil evaluasi AKIP SKPD tahun berikutnya.
2. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti diimplementasikan untuk perbaikan perencanaan, perbaikan manajemen kinerja, perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian reward and punishment hingga ke tingkat staf. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan tindak dimana Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan dalam revisi dokumen perencanaan daerah, perbaikan pengelolaan anggaran, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan pencapaian target program dan kegiatan, dan menjadi pertimbangan dalam pemberian TPP PNS.

E. Pencapaian Kinerja

1. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar terus dilakukan usaha peningkatan kinerja, terutama dalam hal peningkatan kinerja untuk indikator-indikator sasaran yang belum tercapai, diantaranya adalah:
 - Predikat LAKIP Kabupaten
 - Rata-rata nilai ujian SD
 - Rata-rata nilai ujian SMPPertumbuhan ekonomi
 - Nilai Ekspor
 - Nilai Tukar PetaniHal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman namun hasilnya belum maksimal. Dimana hanya Indikator sasaran predikat LAKIP Kabupaten dan Nilai Tukar Petani telah mencapai target. Tetapi, target kinerja yang belum tercapai ataupun yang sudah tercapai akan dilakukan review target yang tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD 2016-2021 yang disusun pada awal tahun 2019.
2. Pada tahun 2017, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman agar terus melakukan peningkatan kinerja agar memperoleh penghargaan tidak hanya bertaraf nasional tetapi juga penghargaan bertaraf internasional. Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dengan upaya peningkatan kinerja, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik akan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan ini diharapkan juga akan berimplikasi pada capaian prestasi hingga di kancah internasional.

Hasil implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap tata kelola pemerintah (good governance) diketahui sudah menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Good Governance, atau dengan kata lain SAKIP mampu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik pada Kabupaten Sleman. Hal ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Partisipasi (Participation), Secara formal dalam penyusunan LKjIP dan pelaksanaan evaluasi SAKIP, keterlibatan semua pihak dalam penyusunan LAKIP ini sudah dikatakan cukup baik. Hal ini dapat diketahui dari penyusunan dan pelaksanaan LAKIP di Kabupaten Sleman yang sudah melibatkan semua pihak mulai dari level SKPD hingga level kecamatan.
2. Transparansi (Transparency), maksudnya Pada Kabupaten Sleman, penyajian informasi terkait SAKIP disajikan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM) Laporan SAKIP. Dimana hal ini adalah bentuk upaya pemerintah untuk bersikap terbuka dan menyediakan semua informasi yang secara legal dapat diakses oleh masyarakat luas, dan mudah dipahami semua informasi terkait informasi akuntabilitas kinerja instansi sudah disajikan.
3. Akuntabilitas (Accountability), pertanggungjawaban kepada pihak terkait atas setiap aktivitas yang dilakukan sudah terlaksana, dimana Kabupaten Sleman mempertanggungjawabkan setiap kinerja yang dilakukannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan dilaporkan secara tepat waktu.
4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness), Dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sleman dapat diketahui bahwa pengelolaan sumber daya publik telah dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna. Hal ini dapat dilihat dari tingkat ketercapaian indikator kinerja terhadap indikator sasaran.
5. Strategic Vision, Hal ini sudah tergambar dengan baik karena di dalam LAKIP Kabupaten Sleman telah memuat visi dan misi, tujuan serta sasaran dan program-program setiap tahunnya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kabupaten Sleman telah dikatakan berhasil, dengan ditandai meningkatnya nilai SAKIP di tahun 2017 B pada tahun 2018 mendapatkan nilai A. Hal ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kualitas terhadap penyusunan, pelaporan, dan penilaian atas SAKIP LAKIP Pada Pemerintah Kabupaten Sleman yang mengikuti pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Selain itu, upaya pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan perbaikan SAKIP dengan melakukan tindak lanjut pada tahun 2018 terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat DIY atas evaluasi SAKIP LAKIP tahun 2017 juga dikatakan memuaskan,
3. Implementasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat mendukung terciptanya good governance atau tata kelola pemerintah yang baik pada Pemerintah Kabupaten Sleman sehingga pemerintah mampu menunjukkan akuntabilitas publik yang baik kepada masyarakat.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke-15. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Batian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, M Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
- Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2017. *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan: Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*. Malang: Intrans Publishing Wisma Kalimetro.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2018. *Buku Pegangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: Menko Perekonomian.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sleman. 2018
- Lewedalu, G., Kalangi, L., & Warongan, J. (2016). *Evaluasi Perusahaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat*. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 11(3).
- Mahsun, Mohammad. (2013). "Pengukuran Kinerja Sektor Publik". Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2018. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI.
- Moehersono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tahir, Arifin. 2011. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan ke-6. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsaputra, Umar. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Agusta, Izwar. 2013. *Pengaruh Budaya Organisasi Akuntabilitas Publik, Pengendalian Intern, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Alviana, Amanda. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan*. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.

- Jannah, Mashira Raudhatul. 2019. Analisis Pengawasan Standar Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor Di Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hulu. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lestari, Tifani Dwi (2019) Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang. Other thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Lewedalu, G., Kalangi, L., & Warongan, J. (2016). Evaluasi Perusahaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 11(3).
- Mandala, Y. (2019). Analisis Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Elektronik (e-Sakip) Di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Widya Mandira).
- Putra, Ginanjar Shaum Ami. 2106. Analisis Implementasi Sistem Pengendalianintern Pemerintah (SPIP) Dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Upaya Penerapan Good Governance (Studi Pada Sekertariat Daerah Kabupaten Sorong Selatan, Teminabuan, Papua Barat).
- Wulandari, Ferida Ovy. (2018). "Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar)". Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukoharjo
- Republik Indonesia, 1999. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Jakarta
- Republik Indoneisa, 2015. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

<https://sakup.slemankab.go.id/main.php>